

ISU-ISU STRATEGIS DESENTRALISASI PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA

Dr. Putu Sudira, M.P.
putupanji@uny.ac.id

(Sekretaris dan Dosen Prodi PTK PPs UNY)

(Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik UNY)

ABSTRAK

Desentralisasi pendidikan kejuruan dihadapkan pada permasalahan isu-isu strategis relevansi, efektifitas, efisiensi, persaingan global, kearifan lokal, industri berbasis pengetahuan, industri kreatif, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas sumberdaya, kapasitas kemitraan, pendidikan karakter, *soft skill*, *link and match*. Sebagai pendidikan yang berbasis dunia kerja, desentralisasi pendidikan kejuruan seharusnya semakin menguatkan fungsi pendidikan kejuruan dalam memberi solusi atas permasalahan-permasalahan pemerintah daerah kabupaten/kota. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota pendidikan kejuruan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan *stakeholders*, dapat mengatasi permasalahan-permasalahan: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) pengentasan pengangguran bagi pemuda; (3) penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganegarannya; (4) pengurangan beban bagi sistem pendidikan akademik; (5) penarikan investasi luar negeri; (6) penjaminan peningkatan penghasilan dan pekerjaan; (7) pengurangan kesenjangan penghasilan antara kelompok kaya dan kaum miskin; (8) wahana pengembangan karya-karya teknologi bermutu; (9) konservasi budaya dan tradisi. Untuk mewujudkan fungsi pendidikan kejuruan tersebut diatas pemerintah daerah perlu menguatkan kerjasama dan fungsi pembinaan secara maksimal.

Kata kunci: Isu strategis, pendidikan kejuruan, desentralisasi.

PENDAHULUAN

Hampir semua pemerintah negara-negara besar di dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Australia, Jepang, Kanada, Korea, India dan China, menaruh harapan besar pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi (*VET system*). VET ditempatkan sebagai panglima dalam hal pengentasan masalah-masalah: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) pengentasan pengangguran bagi pemuda; (3) penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganegarannya; (4) pengurangan beban bagi sistem pendidikan akademik; (5) penarikan investasi luar negeri; (6) penjaminan peningkatan penghasilan dan pekerjaan; (7) pengurangan kesenjangan penghasilan antara kelompok kaya dan

kaum miskin; (8) wahana pengembangan karya-karya teknologi bermutu; (Gill, Dar, & Fluitman: 2000:1); dan (9) konservasi budaya dan tradisi lokal.

Indonesia menempatkan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk menyiapkan lulusan bekerja atau melanjutkan kejenjang lebih tinggi atau bekerja mandiri berwirausaha. Sasaran dan tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia diatur dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3 sebagai pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. Tujuan ini mengandung tiga aspek pokok, yaitu dimilikinya kompetensi kerja, karakter (kepribadian dan ahklak mulia) untuk hidup mandiri (*life skills*), dan berkembangnya karir melalui pendidikan kejuruan. Pernyataan ini tegas sekali bahwa kompetensi kerja dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan tidak cukup bagi seorang pribadi pendidikan kejuruan. Kompetensi kerja harus didukung dengan karakter kejuruan yang baik berupa kepribadian kerja dan ahklak hidup seimbang harmonis antar sesama, lingkungan, dan berke-Tuhan-an. Jelas sekali PP 19 mengamatkan dilaksanakannya pendidikan karakter dalam pendidikan kejuruan.

Sebagai pendidikan untuk dunia kerja, VET yang ditempatkan sebagai panglima dalam pengentasan sembilan permasalahan-permasalahan sebagaimana disebutkan di atas jelas sekali bahwa VET akan efektif dan efisien jika dikelola secara desentralistik (Daun, 2007). Sesungguhnya VET di Indonesia adalah solusi atas permasalahan-permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fenomena mobil Kiat Esemka sebagai salah satu kasus dapat menguatkan peran dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sejak diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, secara hukum pendidikan kejuruan di Indonesia diselenggarakan secara desentralistik. Menurut Slamet PH (2008) implikasi klasik dari desentralisasi pendidikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah tuntutan penguatan kemandirian

dalam peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan kejuruan. Kemandirian mengembangkan kekuatan budaya lokal yang berdampak global. Esensi desentralisasi sangat jelas, yaitu daerah otonom (pemerintah daerah) memiliki tugas dan fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan (Slamet PH, 2008). Pemerintah daerah diharapkan lebih peduli, mandiri dalam mengatur dan mengurus pembenahan mutu pendidikan kejuruan.

Dalam kerangka pengembangan pendidikan kejuruan terdesentralisasi bermutu tinggi maka isu-isu strategis relevansi, efektifitas, efisiensi, persaingan global (Atchoarena, 2009), kearifan lokal, industri berbasis pengetahuan, industri kreatif, kapasitas kelembagaan, kapasitas sumberdaya, kapasitas kemitraan, pendidikan karakter, *soft skill*, *link and match* merupakan permasalahan pokok yang sangat perlu dikaji dan disikapi oleh pemerintah daerah bersama-sama SMK, Perguruan Tinggi (LPTK Kejuruan, Politeknik), dunia usaha-industri (DU-DI), dan masyarakat pengguna pendidikan kejuruan dan vokasi. Dalam paper ini berikut dibahas permasalahan mutu, relevansi, efektifitas, efisiensi, persaingan global dan kearifan lokal, industri kreatif, pendidikan karakter kejuruan dan vokasi di era desentralisasi.

MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN

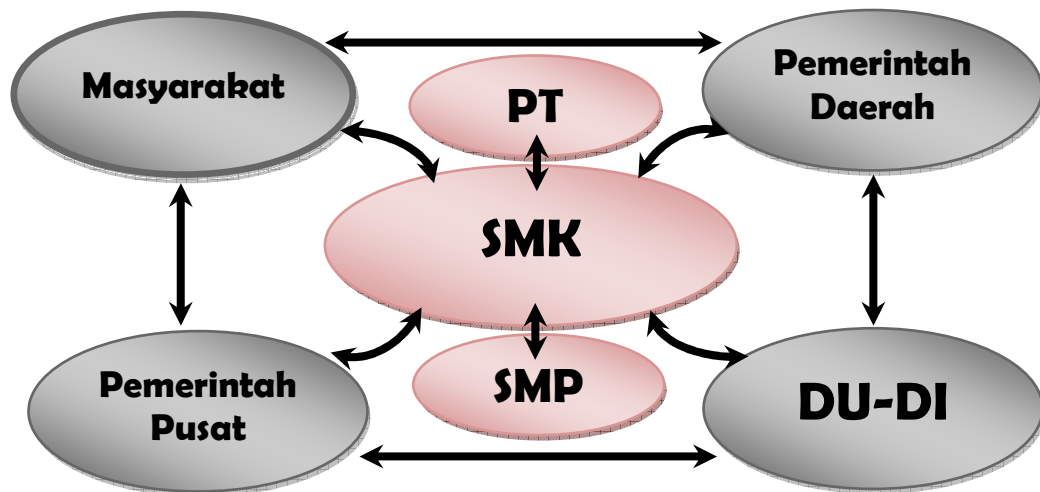
Relevansi masih merupakan isu pokok dari mutu pendidikan kejuruan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagai pendidikan untuk dunia kerja, pendidikan kejuruan dihadapkan pada isu utama yaitu relevansinya dengan kebutuhan *stakeholders*. Relevansi pendidikan kejuruan sangat erat kaitannya dengan kecocokan/*matching* diantara program-program yang diselenggarakan di sekolah, kebutuhan kompetensi kerja di DU-DI (Boutin, Chinien, Moratis, Baalen; 2009), kebutuhan pengembangan diri masyarakat pengguna pendidikan kejuruan (orang tua peserta didik dan peserta didik), kebutuhan pengembangan ekonomi daerah atau kawasan, termasuk kebutuhan sosial, budaya, dan politik. Pelaksanaan program kompetensi keahlian di SMK di seluruh Indonesia relevansinya terhadap kebutuhan DU-DI cenderung masih rendah. Banyak lulusan

SMK di beberapa daerah di Indonesia masih belum terserap karena kualifikasi kompetensi lulusan SMK masih banyak yang belum sesuai dengan jenis dan kualifikasi kebutuhan lapangan kerja. Akibatnya SMK yang seharusnya mengentaskan masalah pengangguran malah menjadi penyumbang pengangguran. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Penyelenggaraan kompetensi keahlian di SMK belum sepenuhnya didasarkan atas analisis kebutuhan pemenuhan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia juga menghadapkan SMK sebagai solusi permasalahan perluasan akses dan pemerataan pendidikan. SMK diharapkan bisa menampung anak-anak dari keluarga miskin. Untuk itu pemerintah daerah Bupati/Walikota dan Gubernur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Ketenaga Kerjaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama DU-DI perlu melakukan pembinaan pengembangan pendidikan kejuruan di SMK. Pihak SMK terus melakukan pemetaan kebutuhan penyelenggaraan bidang dan program keahlian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kawasan dan SDM daerah.

Perubahan paradigma dari *supply drivent* ke *demand drivent* belum terlaksana secara baik dan benar karena pertumbuhan jumlah dan jenis lapangan kerja tidak mencukupi pertumbuhan pencari kerja. Disisi lain masyarakat pengguna pendidikan kejuruan tidak memiliki informasi yang cukup terhadap arah dan muatan dari program-program kompetensi keahlian yang dikembangkan di SMK. Masyarakat pengguna pendidikan kejuruan memilih program kompetensi keahlian belum didasarkan atas analisis bakat dan minat serta analisis peluang pekerjaan. Masyarakat pengguna pendidikan kejuruan cenderung memilih program kompetensi keahlian yang baru favorit di masyarakat. Akibatnya terjadi fluktuasi perkembangan peminatan kompetensi keahlian di SMK. Ada kompetensi keahlian yang diperlukan di masyarakat dan diselenggarakan di SMK tetapi tidak diminati oleh masyarakat. Ada kompetensi keahlian yang sedikit diperlukan di DU-DI kebanjiran peminat. Lemahnya relevansi pendidikan kejuruan di SMK juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas penyelenggara pendidikan kejuruan di tingkat kabupaten/kota. Perubahan kelembagaan pendidikan kejuruan dari khusus (dulu bernama STM, SMEA, SMKK, SMTK, SMSR, SMIK, dll) menjadi lebih

umum dengan nama SMK dimaksudkan untuk memberi ruang kepada SMK agar lebih fleksibel dalam mengembangkan program kompetensi keahlian. Relevansi pendidikan kejuruan secara struktur dapat digambarkan seperti Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tata Hubungan Pengembangan Relevansi Pendidikan Kejuruan

Untuk menghasilkan pendidikan kejuruan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan *stakeholder*, pengelolaan SMK harus betul-betul memperhatikan kebutuhan DU-DI, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Disamping itu artikulasi secara vertikal ke perguruan tinggi dan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih sangat membutuhkan kajian dan penataan. Pendidikan kejuruan di SMK menjadi kurang bermakna jika salah satu dari enam komponen ini tidak terpenuhi kebutuhan dan artikulasinya. Pemerintah daerah sebagai pembina SMK di era otonomi sebaiknya memanfaatkan SMK sebagai basis pengelolaan dan penanganan permasalahan-permasalahan pengembangan SDM, pengembangan ekonomi kawasan, konservasi keunggulan dan kearifan budaya lokal.

Berkaitan dengan mutu pendidikan kejuruan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu: (1) mutu produk; (2) mutu proses; dan (3) mutu layanan. Mutu produk pendidikan kejuruan di SMK dapat diukur dari tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap kualitas dan kualifikasi kompetensi lulusan, barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan mutu proses pendidikan kejuruan dapat diukur dari tingkat

efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan proses diklat. Hal ini berkaitan dengan mutu penyelenggaraan diklat, mutu isi kurikulum, mutu sarana prasarana, mutu tenaga pendidik/pelatih dan mutu tenaga teknisi/laboran. Mutu layanan pendidikan kejuruan dan vokasi dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat pengguna pendidikan kejuruan dan tingkat kepuasan DU-DI terhadap kualitas hasil atau lulusan SMK.

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENDIDIKAN KEJURUAN

Konsep efektifitas pendidikan kejuruan menurut Cheng (2005) dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan melalui peningkatan lingkungan internal dan proses belajar mengajar; (2) efektifitas layanan proses dan hasil pendidikan yang memuaskan para *stakeholders* sebagai pertanggungjawaban pendidikan terhadap publik; (3) efektifitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan individu, masyarakat di masa depan melalui penguatan relevansi tujuan, isi, praksis pendidikan kejuruan bagi generasi baru. Efektifitas internal sebagai jaminan atas tercapainya tujuan pendidikan kejuruan ditempuh melalui peningkatan lingkungan internal dan proses belajar dan mengajar baik pembelajaran teori di sekolah, pembelajaran praktik di sekolah, maupun pembelajaran praktik di DU-DI. Pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya pembelajaran, pengajaran, dan persekolahan diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan? Seberapa baik penyampaian pengetahuan dapat dipastikan membangun peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan? Seberapa baik kemampuan mengajar bagi guru dapat ditingkatkan dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu? Seberapa baik siswa dapat mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program kurikulum dan pengujian?

Pendidikan dan pelatihan kejuruan adalah pendidikan yang sarat dengan biaya tinggi. Kebutuhan peralatan dan bahan praktikum di SMK relatif mahal dibandingkan pendidikan umum. Untuk itu penyelenggaraan pelatihan kejuruan di SMK harus betul-betul disiapkan sebagai proses yang minim akan kegagalan termasuk bahaya keselamatan kerja. Walaupun pengulangan praktikum sebagai

proses pembentukan keterampilan dan pembiasaan kerja di SMK memang diperlukan. Dalam hal ini efisiensi pemanfaatan bahan praktikum, energi listrik, energi gas perlu dikelola dengan baik.

Dalam era industri berbasis pengetahuan dan industri kreatif, SMK juga dihadapkan pada proses memastikan relevansi tujuan, konten, praktik, dan hasil pendidikan SMK untuk masa depan generasi baru di era baru globalisasi, teknologi informasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Seberapa baik proses belajar mengajar, dan pengembangan aktivitas sekolah menumbuhkan potensi individualisasi, lokalisasi, dan globalisasi? Seberapa baik kesempatan belajar siswa termaksimalkan melalui lingkungan IT, networking, guru cerdas terampil mandiri bernurani? Seberapa baik siswa belajar mandiri difasilitasi dan dikembangkan sebagai potensi seumur hidup? Seberapa baik kemampuan siswa untuk belajar mandiri tripilasi mereka dikembangkan? Seberapa baik kecerdasan ganda siswa terus dikembangkan oleh diri mereka sendiri?

PERSAINGAN GOBAL DAN KEARIFAN LOKAL

Pengembangan pendidikan kejuruan di SMK diharapkan menghasilkan output pendidikan manusia berbudaya kerja dan berbudaya belajar yang kompeten, beretoskerja, produktif, mandiri, dan bertanggungjawab. Maka SMK perlu menginternalisasikan konteks nilai-nilai dan kearifan yang telah berkembang di dalam keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, lembaga diklat, masyarakat DU-DI. Otonomi pendidikan meletakkan tantangan kepada pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat 5). Pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia (penjelasan Pasal 35 ayat 1). Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal (penjelasan PP 19 Pasal 91 ayat 1).

Pembudayaan kompetensi di SMK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk: (1) mengembangkan keterampilan kognitif dan psikomotorik individu siswa (Emmerik, Bekker, & Euwema, 2009; Kellet, Humphrey, & Sleeth, 2009); (2) mengembangkan *attitude* (Stumpf, 2009), nilai-nilai luhur budaya; (3) mengembangkan apresiasi positif terhadap pekerjaan dan membangun budaya kerja (Heinz, 2009), membangun budaya belajar, budaya kreatif dan budaya produktif (Thompson, 1973; Gill, Dar, & Fluitman, 2000), melestarikan dan mengembangkan alam dan budaya daerah; (4) mempersiapkan siswa untuk bekerja, berwirausaha, atau meneruskan ke perguruan tinggi (Wardiman, 1998); (5) memberdayakan siswa untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak (Gill, Dar, & Fluitman, 2000); (6) mengembangkan karier sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih (Kellet, Humphrey, Sleeth, 2009); (7) melibatkan masyarakat pemangku kepentingan secara luas, utuh, benar, dan bertanggungjawab (McGrath, S., 2009, Pavlova, 2009); (8) penarikan investasi luar negeri khususnya di bidang industri jasa pariwisata; dan (9) perluasan akses pendidikan (Rojewski, 2009). Artinya pengembangan SMK memerlukan pola pembudayaan kompetensi yaitu sebuah pola yang dapat membangun budaya belajar dan budaya bekerja yang bermakna baik secara mikro pada diri siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan secara makro antar manusia, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan pencipta Tuhan Yang Mahaesa.

Pengembangan kualitas SMK disamping memperhatikan trend dan tantangan globalisasi juga sangat perlu memperhatikan kearifan-kearifan lokal daerah. Sehingga SMK dapat berkembang secara berkelanjutan untuk kemajuan sosial bersama, memberi kontribusi pada pelestarian lingkungan dan budaya, bijak dalam menggunakan sumber daya alam, dan melakukan perbaikan tenaga kerja terdidik dan terlatih (Chinien and Singh, 2009). *Outcome* dari SMK diharapkan bisa *act locally and develop globally* sebagai sosok seorang pribadi lokal yang kuat mempertahankan nilai-nilai tradisi serta berpandangan internasional (Cheng, 2005). Keuntungan yang diperoleh yaitu masyarakat dapat memelihara nilai-nilai tradisi dan identitas budaya, mengakumulasikan pengetahuan-pengetahuan lokali

dalam menumbuhkan pengetahuan baru yang memberi kontribusi pada pertumbuhan masyarakat dan pengetahuan global.

Taiwan terbukti sukses melakukan transformasi pendidikan kejuruan produktif berkaitan dengan produk-produk komputer. Strategi yang diambil pemerintah Taiwan adalah: (a) memperkuat dan mengadakan program-program retraining untuk pekerja; (b) menyediakan transfer pekerjaan dan training keahlian kedua (*second-expertise training*); (c) memperkuat training pada bidang komputerisasi, otomasi industri, CNC, mekatronika, dsb; (d) melakukan uji keterampilan dan mengembangkan sistem sertifikasi; (e) menyediakan training untuk tenaga kerja dalam rangka layanan industry; (f) mendorong industri untuk melakukan program-program training; (g) meningkatkan manajemen skill untuk administrasi dan personil manajer. Untuk mendorong minat anak muda belajar keterampilan kejuruan/vokasi dan juga membentuk perhatian masyarakat pada perkembangan skill, dilakukan *National Skill Competition* sejak tahun 1968. Disamping juga berpartisipasi dalam *International Vocational Training Competition (International Youth Skill Olympics)* sejak tahun 1970.

INDUSTRI KREATIF DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan berkarakter kejuruan yang kreatif produktif sangat mendukung penumbuhan industri kreatif. Dalam Wikipedia.org dinyatakan industri kreatif dalam bidang periklanan meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Industri kreatif berkaitan dengan jasa desain bangunan meliputi perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (*town planning, urban design, landscape architecture*) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior). Dalam bidang pasar barang seni: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan (wikipidea.org). Industri kreatif dalam bidang

kerajinan yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal). Dalam bidang desain kegiatan kreatif terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

Dalam bidang fesyen, kegiatan kreatif terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen. Dalam bidang video, film dan fotografi kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film. Permainan interaktif: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Dalam bidang musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Seni pertunjukan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. Penerbitan dan percetakan: kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan

terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film. Layanan komputer dan piranti lunak: kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Televisi dan Radio: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. Dalam memberikan dukungan layanan pengembangan industri kreatif, lulusan SMK dapat bekerja sebagai pembantu desainer, fotografer, ilustrator, pelaksana pencetakan, pengusaha sablon, fotografer *freelance*, pelaksana pekerjaan periklanan, pembuat video dokumentasi, pembantu kameramen, pembantu editor, pembantu penata suara, pembantu penata cahaya. Disamping itu lulusan SMK juga dapat bekerja sebagai perancang interior hunian, animator interior hunian, drafter interior hunian, perancang interior transportasi, animator interior hunian, drafter interior hunian, perancang dan produksi kria tekstil, perancang dan produksi kria kulit, perancang dan produksi kria keramik, perancang dan produksi kria logam, perancang dan produksi kria kayu, pemusik trumpet, gitaris, operator midi, penari, pengrawit, pelatih seni, pengelola seni pertunjukan, penata kerawitan sunda, dalang, pekerja seni teater, staff ticketing, staff reservasi, staff perjalanan wisata, pramuwisata muda, staf reservation, reception, operator telepon, porter, *business center attendant*, *room boy/maid/attendant*, *houseman/housemaid*, *order taker*, *linen* dan *laundry*, *waiter/waitress*, penata kecantikan kulit, penata kecantikan rambut, pelaksana pembuatan busana butik, *handling*, *steward*, *waiter*, *cook helper*, pengolah pastry bakery

KESIMPULAN

Desentralisasi pendidikan dalam kerangka peningkatan mutu, relevansi, efektifitas, efisiensi pendidikan kejuruan berkarakter produktif menghadapi persaingan global dan pengembangan kearifan lokal membutuhkan dukungan dan kerjasama baik diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, DU-DI, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan dasar. Pendidikan kejuruan di SMK yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dapat mengentaskan masalah-masalah: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) pengentasan pengangguran bagi pemuda; (3) penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganegaranya; (4) pengurangan beban bagi sistem pendidikan akademik; (5) penarikan investasi luar negeri; (6) penjaminan peningkatan penghasilan dan pekerjaan; (7) pengurangan kesenjangan penghasilan antara kelompok kaya dan kaum miskin; (8) wahana pengembangan karya-karya teknologi bermutu; dan (9) konservasi budaya dan tradisi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atchoarena, D. (2009). Overview: Issues and Options in Financing Technical and Vocational Education and Training. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp.129-1036). Germany: Springer.
- Boutin, F., Chinien, C., Moratis, L., Baalen, P.V. (2009). Overview: Changing Economic Environment and Workplace Requirements: Implications for Re-Engineering TVET for Prosperity. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 81-96). Germany: Springer.
- Cheng, Y.C. (2005). *New Paradigm for Re-engineering Education, Globalization, Localization and Individualization*. Netherland: Springer
- Chinien, C. and Singh, M. (2009). Overview: Adult Education for the Sustainability of Human Kind. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2521-2536). Germany: Springer.
- Chinien, C. Boutin, F., Plane, K. (2009). The Challenge for ESD in TVET: Developing Core Sustainable Development Competencies and Collaborative Social Partnerships for Practice (2553-2570). In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2553-2570). Germany: Springer.

- Daun, H. (2007). *School Decentralization in The Context of Globalizing Governance International Comparison of Grassroots Responses*. Netherland: Springer.
- Emmerik, I.J. H. V., Bakker A.B, Euwema M.C.. (2009). *Explaining employees' evaluations of organizational change with the job-demands resources model*; Career Development International Journal Vol. 14 No. 6, 2009 pp. 594-613
- Gill, I.S., Fluitman, F.,& Dar, A. (2000). *Vocational Education and Training Reform, Matching Skills to Markets and Budgets*. Washington: Oxford University Press.
- Heinz .W.R (2009). Redefining the Status of Occupations. In J. A. Athanasou , R. V. Esbroeck. *International Handbook of Career Guidance*. Springer Science Business Media B.V.
- Hiniker, L.A. and Putnam, R.A. (2009). Partnering to Meet the Needs of a Changing Workplace (203-208). In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 203-208). Germany: Springer.
- McGrath, S. (2009) *Reforming Skills Development, Transforming the Nation: South African Vocational Education and Training Reforms, 1994–2005*: Rupert Maclean, David Wilson, Chris Chinien; *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning*: Germany: Springer Science+Business Media
- Pavlova M. (2009). *The Vocationalization of Secondary Education: The Relationships between Vocational and Technology Education*. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1805-1822). Germany: Springer.
- Pavlova, M. & Munjanganja,L.E. (2009) *Changing Workplace Requirements: Implications for Education*. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 180581-96). Germany: Springer.
- Rojewski. J.W (2009). A Conceptual Framework for Technical and Vocational Education and Training. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 19-40). Germany: Springer.
- Singh M. (2009). Social and Cultural Aspects of Informal Sector Learning: Meeting the Goalsof EFA. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 349-364). Germany: Springer.
- Slamet, P.H. (2008).*Desentralisasi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Stumpf. S.A (2009). *Promotion to partnerThe importance of relationship competencies and interpersonal style*. Career Development International Vol. 14 No. 5, 2009 pp. 428-440 q Emerald Group Publishing Limited 1362-0436
- Thompson, John F, (1973). *Foundation of Vocational Education Social and Philosophical Concepts*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui SMK*. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset.